

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***1.1.Latar Belakang***

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat direalisasikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2018 – 2023, skla prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda disusun secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan SKPD. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Di dalam Renja Perangkat daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat direalisasikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daaerah lainnya.

## ***1.2. Landasan Hukum***

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaen Bone Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone);
22. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone;

### ***1.3. Maksud dan Tujuan***

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2019 – 2023.
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

#### ***1.4 Sistematika Penulisan***

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan , bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja, maksud dan tujuan , landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, bab ini memuat beberapa program, kegiatan dan pendanaan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, bab ini dipaparkan rumusan strategi dari kebijakan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistik, rasional dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, bab ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program dan pagu anggaran tahun 2021 serta prakiraan maju tahun 2020.

BAB V Penutup, menyajikan kesimpulan dan harapan atas rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2021.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIPPD; 3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; 4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten. 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone sampai dengan Tahun 2019.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Bone telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2019, Bappeda Kabupaten Bone secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp. 3.720.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.591.468.603,- atau sebesar 96,54 % dari total alokasi yang ada.

Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Pada tabel 2.1, umumnya kinerja tahun 2019 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%.

**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
	Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>2.438.439.000</b>	<b>1.860.834.829</b>	<b>422.728.700</b>	<b>420.775.353</b>	<b>1,00</b>	<b>464.225.000</b>	<b>463.247.974</b>	<b>36</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (angsuran)	73.261.000	75.524.126	12.000.000	11.112.115	6	12.000.000	2.780.148	19

				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	247.882.000	337.490.000	76.642.800	57.978.288	1	76.642.800	11.263.046	28,5
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah alat yang diperbaiki (paket)	26.026.000	32.581.000	5.000.000	6.500.000	1	5.000.000	2.050.000	4
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	24.422.000	18.008.000	4.000.000	5.000.000	1	4.000.000	650.000	5
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali)	161.786.000	81.920.000	29.150.000	29.495.000	1	29.500.000	5.350.000	5
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan	1.474.651.000	977.491.853	205.000.000	273.475.581	1	205.000.000	110.108.632	5
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	430.411.000	337.819.850	80.273.500	79.676.950	1	80.273.500	26.337.000	5
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>876.173.800</b>	<b>958.990.981</b>	<b>281.911.600</b>	<b>277.219.916</b>	<b>4</b>	<b>195.700.000</b>	<b>195.528.896</b>	<b>23</b>

				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	293.045.000	491.540.000	199.000.000	96.000.000	1	199.000.000	0	3
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebel yang diadakan (paket)	152.627.800	71.000.000	7.400.000	18.200.000	1	7.400.000	0	8
				Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paket)	122.102.000	123.317.000	24.200.000	20.000.000	1	24.200.000	13.000.000	6
				Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (paket)	308.399.000	273.133.981	51.688.700	61.328.896	1	51.688.700	23.340.959	5
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)</b>	<b>112.640.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>25.512.500</b>	<b>25.512.500</b>	<b>1</b>	<b>18.450.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>6</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	112.640.000	-	25.512.500	25.512.500	1	18.450.000	18.450.000	6
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>305.255.000</b>	<b>-</b>	<b>50.625.000</b>	<b>40.125.000</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus singkat/pelatihan (orang)	305.255.000	-	50.625.000	40.125.000	1	0	0	0

				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</b>	<b>666.154.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>67.219.700</b>	<b>57.968.800</b>	<b>2</b>	<b>84.165.000</b>	<b>84.132.800</b>	<b>15</b>
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja (dokumen)	124.874.000	16.600.000	15.625.000	19.114.000	1	15.625.000	7.924.200	7
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	109.669.230	0	15.000.000	0	1	15.000.000	0	8
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	208.845.000	0	15.860.000	0	1	15.860.000	0	8
				<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)</b>								
				Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	541.280.000	0	27.000.000	65.018.800	1	27.000.000	11.422.500	8

				Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan web yang dikelola (kegiatan)	250.675.000	59.000.000	59.660.000	40.850.000	1	59.660.000	32.040.000	
				Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan (kabupaten dan provinsi)	686.8224.000	68.965.000	100.000.000	23.860.000	1	100.000.000	0	0
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>	<b>537.249.000</b>	<b>0</b>	<b>94.150.000</b>	<b>94.075.000</b>	<b>1</b>	<b>70.260.000</b>	<b>70.260.000</b>	<b>23</b>
				Peninmgkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (orang)	537.249.000	0	78.000.000	70.260.000	1	78.000.000	0	0
				<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)</b>	<b>3.714.624.000</b>	<b>663.760.500</b>	<b>495.090.000</b>	<b>487.995.750</b>	<b>5</b>	<b>634.200.440</b>	<b>634.191.668</b>	<b>23</b>
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD (dokumen)	445.000.000	-	-	-	0	88.858.440	88.858.440	5
				Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	1.062.288.000	125.610.000	76.482.780	76.481.780	1	177.942.000	177.942.000	6
				Penyelenggaraan Musrembang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrembang RKPD Kabupaten	1.239.336.000	229.350.000	239.600.000	177.942.000	1	177.942.000	156.871.599	7

					dilaksanakan (kali)								
				Penyusunan kebijakan umum	Jumlah dokumen kebijakan umum yang tersusun (dokumen)	286.940.000	44.625.000	51.800.000	47.000.000	1	47.000.000	0	5
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan (dokumen)	915.765.000	212.700.500	144.000.000	189.499.228	1	144.000.000	18.769.000	5
				Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan kecamatan yang telah diasistensi dan diverifikasi	420.000.000	0	47.600.000	0	1	47.600.000	0	1
				<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)</b>	<b>915.765.000</b>	<b>525.278.004</b>	<b>559.187.500</b>	<b>545.765.350</b>	<b>4</b>	<b>150.000.000</b>	<b>144.970.420.000</b>	<b>0</b>
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian	641.036.000	129.740.613	86.000.000	89.531.320	1	86.000.000	20.113.500	5

				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan yang tersusun (dokumen)	659.350.000	127.663.504	87.000.000	79.862.980	1	87.000.000	9.250.000	5
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan yang tersusun (dokumen)	671.561.000	258.761.500	83.000.000	81.457.200	1	83.000.000	10.220.500	5
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bagi hasil pajak rokok (dokumen)	915.765.000	138.853.000	150.000.000	144.970.420	1	150.000.000	0	5
				<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)</b>	-	<b>677.662.800</b>	<b>454.302.500</b>	<b>452.234.079</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan politik yang tersusun (dokumen)	1.075.945.000	339.852.400	166.664.440	181.009.900	1	166.664.440	77.239.800	7

				Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang pendidikan, mental dan budaya yang tersusun (dokumen)	608.629.000	165.808.400	152.320.250	51.974.433	1	152.320.250	27.326.700	5
				Penyusunan Perencanaan bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen perencanaan bidang pendidikan, mental dan budaya yang tersusun (dokumen)	1.832.873.000	72.414.000	257.015.310	464.962.400	1	257.015.310	51.974.433	0
				<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dalam RKPD (%)</b>	<b>0</b>	<b>353.090.022</b>	<b>1.080.910.000</b>	<b>806.866.224</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur yang tersusun	909.660.000	96.644.824	120.000.000	148.139.700	1	120.000.000	25.178.000	0
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang tata ruang wilayah yang tersusun	860.820.000	89.367.400	121.200.000	135.456.800	1	121.200.000	32.042.075	0

				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang tersusun	903.555.000	77.436.000	120.800.000	121.200.000	1	120.800.000	23.840.000	0
				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Irigasi yang Berbasis Masyarakat	Jumlah Laporan IPDMIP (laporan)	2.258.887.000	89.641.798	370.000.000	350.268.800	1	370.000.000	33.426.105	0

Realisasi anggaran belanja langsung mencapai Rp. 3.591.468.603,- atau 96,54, %. Namun demikian masih terdapat perbedaan dengan kondisi stakeholder. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang digunakan sebagian besar masih pada tingkat output dan hanya sebahagian kecil yang dapat mencapai outcome dan merupakan outcome level terendah sebagaimana idealnya harapan stakeholder indikator kinerja sasaran mencapai outcome. Hal ini disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome, atas seluruh kegiatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi riil yang diharapkan. Secara keseluruhan tidak ditemukan hambatan atau kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dapat terlaksana dengan baik.

## ***2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah***

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan langsung dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.

Bappeda Kabupaten Bone melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan serta tugas pembantuan lainnya. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bone ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone serta Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2013- 2018. Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2017.

Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bone, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Tabel Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam tabel berikut :

### Analisis Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP			C	B	CC	B	C	B	B	BB	
2	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (persen)			75	76	77	77	75	76	77	77	
3	Persentase Hasil Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan atau ditindak lanjuti (persen)			80	85	85	90	80	85	85	90	
4	Persentase Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja dalam RKPD dengan RPJMD (persen)			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kesesuaian Tujuan Program APBD dengan RKPD (persen)			85	85	90	95	85	85	90	95	

### ***Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah***

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Relatif rendahnya kualitas SDM, pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dari kemampuan teknis perencanaan dan kualitas pendidikan formal
2. Kurangnya peralatan komunikasi berbasis Informasi Teknologi (IT)
3. Masih kurang sinerginya kordinasi antar Bidang pada Bappeda dan masih kurang sinergisnya koordinasi eksternal dengan Perangkat Daerah.
4. Masih rendahnya kualitas produk perencanaan terlihat dari rumusan tinngkat kinerja yang belum SMART-C
5. Belum adanya data yang akurat, valid, dan relevansi data yang up to date yang dapat mendukung kualitas produk perencanaan yang baik.

### ***2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD***

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari

1. Diterbitkannya peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018
3. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018  
Perbandingan Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100	522.457.400	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100	522.457.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	TR. Barat	Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (angsuran)	12	14.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	T.R. Barat	Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (angsuran)	12	14.520.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TR. Barat	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	144	90.323.400	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	T.R. Barat	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	144	90.323.400	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	TR. Barat	Jumlah alat kerja yang diperbaiki (paket)	5	6.050.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Kerja	T.R. Barat	Jumlah alat kerja yang diperbaiki (paket)	5	6.050.000	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	TR. Barat	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	5	4.840.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	T.R. Barat	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	5	4.840.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam	TR. Barat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100 kali	292.269.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	T.R. Barat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	100 kali	292.269.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah dan Luar Daerah		dalam dan luar daerah (kali)					dan luar daerah (kali)			
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	TR. Barat	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	3 Paket	85.305.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	T.R. Barat	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	3 Paket	85.305.000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana (%)</b>	<b>100</b>	<b>530.255.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana(%)</b>	<b>100</b>	<b>530.255.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	TR. Barat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit	26.620.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	TR. Barat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit	26.620.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	TR. Barat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 paket	58.080.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	T.R. Barat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 paket	58.080.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	TR. Barat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	4 paket	58.080.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	T.R. Barat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	4 paket	58.080.000	
	Pengadaan Mabeleur	TR. Barat	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	4 jenis	30.250.000	Pengadaan Mabeleur	T.R. Barat	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	4 jenis	30.250.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	TR. Barat	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	24.200.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	T.R. Barat	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	24.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	TR. Barat	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 unit	61.105.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	T.R. Barat	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 unit	61.105.000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>22.325.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>22.325.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	TR. Barat	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	55 set	22.325.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	T.R. Barat	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	55 set	22.325.000	
	<b>Program Peningkatan Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>88.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>88.000.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	TR. Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PIM	2 orang	60.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	TR. Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PIM	2 orang	60.500.000	
	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	TR. Barat	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	5 orang	27.500.000	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	T.R. Barat	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	5 orang	27.500.000	
	<b>Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenirja &amp;</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi Penyusunan Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>110.640.000</b>	<b>Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenirja &amp; Keuangan</b>	<b>T.R. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi Penyusunan Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>110.640.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Keuangan</b>										
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TR. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3 dok	24.750.000	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TR. Barat	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3 Dokumen	24.750.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	TR. Barat	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	36.300.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	TR. Barat	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	36.300.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	TR. Barat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	49.590.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	TR. Barat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	49.590.000	
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum</b>	<b>100 %</b>	<b>295.086.000</b>	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>T.R. Barat</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum</b>	<b>100 %</b>	<b>295.086.000</b>	
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	TR. Barat	Jumlah pemeliharaan Web yang dikelola	1 Web	49.682.000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	T.R. Barat	Jumlah pemeliharaan Web yang dikelola	1 Web	49.682.000	
	Promosi dan Pameran Pembangunan	TR. Barat	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan (Kabupaten dan Provinsi)	2 Kali	136.125.000	Promosi dan Pameran Pembangunan	TR. Barat	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan (Kabupaten dan Provinsi)	2 Kali	136.125.000	
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	TR. Barat	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	109.279.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	TR. Barat	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	109.279.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Persentase Peningkatan Aparat Perencana yang telah Mengikuti Bimtek Perencanaan</b>	<b>80 %</b>	<b>101.184.800</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>T.R. Barat</b>	<b>Persentase Peningkatan Aparat Perencana yang telah Mengikuti Bimtek Perencanaan</b>	<b>80 %</b>	<b>101.184.800</b>	
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	TR. Barat	Jumlah Aparat Perencana yang telah Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)	66 Orang	101.184.800	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	TR. Barat	Jumlah Aparat Perencana yang telah Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)	35 Orang	101.184.800	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>931.005.850</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>931.005.850</b>	
	Penyusunan Rancangan RPJMD	T.R.Barat	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	168.281.700	Penyusunan Rancangan RPJMD	T.R.Barat	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	168.281.700	
	Penyusunan Rancangan RKPD	T.R.Barat	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun	2.dok	172.031.700	Penyusunan Rancangan RKPD	T.R. Barat	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen	172.031.700	
	Penyelenggaraan Musrembang RKPD	27 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrembang RKPD Kabupaten Bone	1 kali	233.822.450	Penyelenggaraan Musrembang RKPD	27 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrembang RKPD Kabupaten Bone	1 kali	233.822.450	
	Monitoring, Evaluasi,	TR.	Jumlah dokumen	4 dok	200.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan	TR. Barat	Jumlah dokumen	4	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Barat	evaluasi dan pelaporan			Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		evaluasi dan pelaporan	Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum	T.R Barat	Jumlah Kebijakan Umum yang tersusun	2 dok	56.870.000	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum	T.R Barat	Jumlah Kebijakan Umum yang tersusun	2 Dokumen	56.870.000	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>T.R Barat</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>553.545.000</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>T.R Barat</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>553.545.000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian yang tersusun	2 dok	139.765.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian yang tersusun	2 Dok	139.765.000	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Industri dan Perdagangan	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi Bidang Pariwisata, industri, dan perdagangan yang tersusun	2 dok	130.680.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Industri dan Perdagangan	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi Bidang Pariwisata, industri, dan perdagangan yang tersusun	2 dok	130.680.000	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Keuangan dan Pendanaan yang tersusun	2 dok	133.100.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Keuangan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dok	133.100.000	
	Monitoring, Evaluasi	T.R	Jumlah Laporan	1 dok	150.000.000	Monitoring, Evaluasi Dan	T.R Barat	Jumlah Laporan	1 Dok	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dan Pelaporan	Barat	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok			Pelaporan		Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok			
	<b>Program perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>T.R Barat</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>747.086.975</b>	<b>Program perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>T.R Barat</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>747.086.975</b>	
	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik yang tersusun	4 dok	211.600.000	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik yang tersusun	4 Dok	211.600.000	
	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	4 Dok	347.774.750	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	4 Dok	347.774.750	
	Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan,	3 Dok	191.712.500	Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan, mental dan budaya	3 Dok	191.712.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mental dan budaya yang tersusun								
	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam</b>	<b>T.R Barat</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana dan sumber daya alam dalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>977.680.000</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam</b>	<b>T.R Barat</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana dan sumber daya alam dalam RKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>977.680.000</b>	
	Koordinasi Pengembangan Irigasi yang Berbasis Masyarakat	T.R Barat	Jumlah dokumen IPDMIP yang tersusun	1 dok	447.700.000	Koordinasi Pengembangan Irigasi yang Berbasis Masyarakat	T.R Barat	Jumlah dokumen IPDMIP yang tersusun	1 dok	447.700.000	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengembang Infrastruktur yang tersusun	2 Dok	180.290.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengembang Infrastruktur yang tersusun	2 Dok	180.290.000	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata ruang dan Pengembangan Wilayah	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tata ruang dan pengembangan wilayah yang tersusun	2 Dok	170.610.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata ruang dan Pengembangan Wilayah	TR. Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tata ruang dan pengembangan wilayah yang tersusun	2 Dok	170.610.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang tersusun	3 Dok	179.080.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	T.R Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang tersusun	3 Dok	179.080.000	

## ***2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat***

Kajian dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### ***3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional***

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019, Tema Pembangunan Nasional adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

##### ***3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah***

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2019 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rancangan teknokratis) dalam masa transisi Pemerintahan Kabupaten Bone dari Periode Lima sebelumnya (Tahun 2013 – 2018) menuju periode Lima Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diatas kemudian diangkat menjadi tema pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi yaitu :

“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing “

Sesuai misi tersebut diatas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023 rumusan tujuan dan sasaran renja Bappeda 2021, yaitu :

## **Tujuan dan Sasaran**

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah

### **Sasaran**

1. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah*
2. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah.

### **Sasaran**

1. *Meningkatnya kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah.*
3. Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

### **Sasaran**

1. *Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

### **Sasaran**

1. *Meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah*

## **3.3 Program dan Kegiatan**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Bappeda Kabupaten Bone menangani urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Bone pada tahun 2021 sebanyak 11 program dan 36 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. 6.629.072.731,-. Kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Bone bersumber dari 2 usulan yaitu (1) Pokok Pikiran DPRD dan Kepala Daerah (Politis), dan (2) hasil penelaahan isu strategis OPD (Teknokratis).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka Penyusunan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Periode tahun 2021, maka perlu diadakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang direncanakan sebesar : Rp. 7.973.266.300,-

Berdasarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2020, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari Program dan Kegiatan Utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin (organik) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama organisasi yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Secara lengkap, rumusan rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2021, dengan mempertimbangkan sumber-sumber penganggaran lainnya yang bersumber dari DAU-APBD Kabupaten. Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2022
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Urusan Wajib								
1	06			Perencanaan Pembangunan								
1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran		100%	522.457.400			1	522.457.400
1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (angsuran)	TR. Barat	12	14.520.000	DAU		12	14.520.000

1	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	TR. Barat	204	90.323.400	DAU		204	90.323.400
1	06	01	09	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkaoan Kantor	Jumlah alat kerja yag diperbaiki (paket)	TR. Barat	5	6.050.000	DAU		5	6.050.000
1	06	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkaoan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	TR. Barat	5	4.840.000	DAU		5	4.840.000
1	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali)	TR. Barat	32	29.150.000	DAU		32	32.065.000
1	06	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	TR. Barat	100	292.269.000	DAU		100	292.269.000
1	06	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	TR. Barat	7	85.305.000	DAU		7	85.305.000

					(paket)							
1	06	01		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana (%)</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>100</b>	<b>530.255.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>530.255.000</b>
1	06	01	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	TR. Barat	1	330.000.000	DAU		2	330.000.000
1	06	01	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (unit)	TR. Barat	3	26.620.000	DAU		3	26.620.000
1	06	01	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	TR. Barat	4	58.080.000	DAU		4	58.080.000
1	06	01	10	Pengadaan Mabeleur	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan (jenis)	TR. Barat	3	30.250.000	DAU		3	30.250.000

1	06	01	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)	TR. Barat	17	24.200.000	DAU		17	61.105.000
1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (paket)	TR.Barat	21	61.105.000	DAU		21	
1	06	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (persen)</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>100</b>	<b>88.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>22.234.500</b>
1	06	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM (orang)	TR.Barat	2	60.500.000	DAU		2	
1	06	03	05	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	TR. Barat	5	25.000.000	DAU		5	27.500.000
1	06	06		<b>Program Peningkatn Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Cakupan realisasi Penyusunan Dokumen</b>	<b>TR. Barat</b>	<b>100</b>	<b>110.640.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	

1	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (dokumen)	TR. Barat	3	22.750.000	DAU		3	24.749.340
1	06	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (laporan)	TR. Barat	1	36.300.000	DAU		1	36.300.000
1	06	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	TR. Barat	1	49.590.000	DAU		1	49.500.000
1	06	08		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum</b>	TR. Barat	100	295.086.000	DAU		100	293.086.200
1	06	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun(dokumen)	TR. Barat	8	109.297.000	DAU		9	107.278.600
1	06	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Situs Web yang dikelola	TR. Barat	1	49.682.000	DAU		1	49.682.600

1	06	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Penyelenggara an Pameran Pembangunan (Kabupaten dan Provinsi)	TR. Barat	2	136.125.000	DAU		2	136.125.000
1	06	20		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase Peningkatan Aparat Perencana yng telah mengikuti Bimtek Perencanaan</b>		80%	101.184.8000			1	117.128.000
1	06	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Perencanaan	TR.Barat	1	101.184.800	APBD		Kegiatan	106.480.000
1	06	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah</b>		100 (%)	931.005.850			100 (%)	818.455.550
1	06	21	08	Penyusunan Rancangan Rkpd	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun	TR. Barat	2	168.281.700	APBD		2	210.540.000
1	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten	TR. Barat	1	233.822.450	APBD		1	245.630.000

					dilaksanakan							
1	06	21	31	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	TR. Barat	4	200.000.000	APBD		4	142.780.000
1	06	21	16	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum	TR. Barat	2	56.870.000	APBD		2	56.870.000
1	06	21	17	Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah diasistensi dan verifikasi	TR. Barat	1	100.000.000	APBD		1	162.635.550
1	06	22		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Presentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD</b>	TR. Barat	100 (%)	553.545.000			100 (%)	561.400.000
1	06	22	08	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Pajak Rokok	TR. Barat	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000

1	06	22	15	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	TR. Barat	2	139.680.000	APBD		2	145.200.000
1	06	22	16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	TR. Barat	2	130.680.000	APBD		2	133.100.000
1	06	22	17	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	TR. Barat	2	133.100.000	APBD		2	133.100.000
1	06	23		<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Presentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam RKPD</b>		100 (%)	3.841.087.250			100 (%)	819.458.177
1	06	23	09	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	TR. Barat	1	211.600.000	DAU		1	234.133.548

					dan Politik							
1	06	23	10	Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	TR. Barat	3	191.712.500	APBD		4	190.724.629
1	06	23	11	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	TR. Barat	4	343.774.750			4	349.600.000
1	06	24		<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dalam RKPD</b>		100 (%)	977.680.000			100 (%)	977.680.000
1	06	24	09	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Irigasi yang Berbasis Masyarakat	Jumlah Dokumen IPDMIP	Tanete Riattang Barat	1	447.700.000	APBD		1	447.700.000
1	06	24	10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	TR. Barat	1	180.290.000	APBD		1	180.290.000

					Bidang Infrastruktur							
1	06	24	11	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan tata ruang dan Pengembangan Wilayah	TR. Barat	1	170.610.000	APBD		1	170.610.000
1	06	24	12	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman		1	179.080.000	APBD		1	179.080.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2021, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

